



Judul : Netralitas Mesti Tetap Terus Terjaga  
Tanggal : Minggu, 26 November 2023  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## Mutasi Kalapas Jelang Pemilu

# Netralitas Mesti Tetap Terus Terjaga

**ANGGOTA** Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menyindir potensi kerawanan pemilu yang muncul saat pelaksanaan pemilu dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Potensi kerawanan ini muncul setelah Dirjen Pemasyarakatan melakukan mutasi besar-besaran Kepala Lapas di seluruh Indonesia.

“Di dapil saya Jawa Timur itu, hampir seluruh Kalapas ganti. Dan setelah saya cermati, semua Kalapas (seluruh Indonesia) hampir ganti semua. Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu Kalapas diganti semua,” heran Wihadi di Jakarta, kemarin.

Wihadi curiga ada motif tertentu dari mutasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ini. Apalagi dia mendengar ada Pakta Integritas yang dilakukan antara Dirjen Pemasyarakatan dan (Penjabat) Sekjen Kementerian Hukum dan HAM untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan.

“Dan pada saat nanti Kalapas-kalapas yang dipindahkan, yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi di Lapas ini,” ujarnya.

Kecurigaan Wihadi makin menjadi lantaran TPS Lapas ini masuk dalam kategori khusus. Dalam arti, semua saksi dan KPPS di dalam TPS Lapas ini adalah para sipir. Artinya, (warga binaan) itu nggak perlu nyoblos.

“Yang nyoblos sipir saja bisa. Apalagi warga binaan kan akan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam karena permasalahan ini sangat rawan dan

(pemilu) 2019 juga terdeteksi permasalahan ini,” bilangnya.

Politisi Fraksi Gerindra ini menuturkan, pengalaman Pemilu 2019 itu menunjukkan bahwa yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh pengelola Lapas. Bahkan saksi dari partai pun tidak bisa masuk ke dalam. Makanya, dia mendorong agar ada mekanisme dan pengaturan terkait masalah TPS di dalam Lapas ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah kecurigaan Wihadi. Yasonna menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM sudah ada kerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan pemilu. “Kita ada naskah kerja sama. Jadi saya kira kekhawatiran teman-teman menjadi tidak relevan sebenarnya,” ujarnya.

Yasonna menegaskan, setiap TPS punya data. Saksi-saksi yang ada di dalam TPS Lapas juga merupakan saksi-saksi dari partai-partai kontestan pemilu. “Tapi saya ditanya, saya kira (pemilu) 2019 tidak ada masalah,” tegasnya.

Karena itu, dia menjamin pelaksanaan pemilu di dalam Lapas berlangsung jujur, adil, bebas dan rahasia. Dia pun menampik jika Lapas bisa dikontrol untuk memenangkan calon tertentu.

“Lapas Malang itu yang menang (pemilu 2019) di situ caleg Gerindra. Boleh dikroscek itu supaya jelas bahwa kita ini menjaga profesionalitas. Bahwa kami sosialisasi adalah tugas yang diberikan masing-masing, termasuk karena ini permasalahan kita laksanakan,” ujarnya. ■ KAL